



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SUB UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CATUR BUDI FAJAR SUMARMO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **454233**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 45.000.000

1. MOTOR, HONDA NC12A1CBF A/T/ SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA CB15A1RRF M/T /SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 132.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 552.475.911**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.179.475.911

III. HUTANG Rp. 51.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.128.475.911

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.